

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2013 - 2018. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 5 (lima) tahun yang lalu, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah; dan (v) pendapatan perkapita masyarakat dan laju inflasi lokal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Tabel. 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013-2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata- rata Pertum- buhan (%)
A	PENDAPATAN	1.164.352.549.296,01	1.320.648.890.197,28	1.387.222.252.820,42	1.571.332.218.626,47	1.500.633.237.946,70	6,81
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.041.969.818,21	246.427.699.826,28	263.925.520.119,42	287.525.214.004,49	397.327.847.289,10	
1.1	Pajak Daerah	91.476.549.341,38	128.824.086.122,82	147.889.448.423,30	158.740.884.098,89	201.429.136.841	
1.2	Retribusi Daerah	37.169.611.073,05	59.939.980.257,70	58.812.352.554,45	80.679.063.851,03	43.077.425.944	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.388.593.783,78	5.017.222.922,00	7.974.858.186,57	7.266.051.209,95	8.066.340.479	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.007.215.620,00	52.646.410.523,76	49.248.860.955,10	40.839.214.844,62	144.754.944.025,57	
2	DANA PERIMBANGAN	821.633.897.881,00	852.471.935.221,00	858.677.840.368,00	1.177.857.284.208,00	1.013.005.895.282,00	6,91
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.767.549.881,00	123.603.433.221,00	83.342.923.368,00	102.727.973.433,00	108.336.723.678,00	
2.2	Dana Alokasi Umum	626.331.743.000,00	678.620.172.000,00	668.201.807.000,00	727.564.344.000,00	714.783.378.000,00	
2.3	Dana Alokasi Khusus	48.534.605.000,00	50.248.330.000,00	107.133.110.000,00	347.564.966.775,00	189.885.793.604,00	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	193.676.681.596,80	221.749.255.150,00	264.618.892.333,00	105.949.720.413,98	90.299.495.375,60	-10,23
3.1	Hibah	573.637.000,00	521.847.475,00	-	39.039.796.578,00	2.819.000.000,00	
3.2	Dana darurat	9.658.244.274,80	8.750.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **)	44.644.819.322,00	65.061.601.675,00	73.840.521.333,00	66.598.538.835,98	80.760.495.375,60	

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata- rata Pertum- buhan (%)
3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	138.799.981.000,00	147.415.806.000,00	182.778.371.000,00	311.385.000,00	-	
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	6.720.000.000,00	
B	BELANJA	1.151.885.966.248,19	1.277.947.245.874,50	1.426.801.893.158,80	1.526.705.967.976,45	1.496.544.155.634,80	6,90
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	639.848.119.610,19	651.963.306.769,00	638.692.856.708,00	735.466.555.433,50	633.792.563.865,00	0,30
1.1	Belanja Pegawai	592.744.670.347,00	642.424.088.743,00	627.677.871.221,00	721.853.145.334,50	609.075.861.181,00	
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
1.4	Belanja Hibah	41.322.686.558,00	3.791.283.500,00	5.627.038.649,00	9.682.097.750,00	18.623.738.650,00	
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.436.830.000,00	4.282.750.000,00	3.645.000.000,00	1.557.150.000,00	3.407.880.000,00	
1.6	Belanja Bagi hasil	2.019.711.376,00	971.706.526,00	-	-	-	
1.7	Belanja Bantuan keuangan	835.652.829,19	-	1.194.446.838,00	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	
1.8	Belanja Tidak Terduga	488.568.500,00	493.478.000,00	548.500.000,00	1.082.029.949,00	1.392.951.634,00	
2	BELANJA LANGSUNG	512.037.846.638,00	625.983.939.105,50	788.109.036.450,80	791.239.412.542,95	862.751.591.769,80	14,40
2.1	Belanja Pegawai	41.838.019.666,00	58.257.749.136,00	65.075.970.607,00	62.458.092.882,00	74.716.530.322,50	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.981.332.594,00	271.629.484.774,50	337.904.321.856,00	304.585.364.771,00	368.718.465.478,80	
2.3	Belanja Modal	273.218.494.378,00	296.096.705.195,00	385.128.743.987,80	424.195.954.889,95	419.316.595.968,50	
C	PEMBIAYAAN DAERAH	126.744.644.712,82	126.928.509.214,34	169.630.153.537,12	89.348.040.165,74	127.320.238.476,00	7,24
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	148.238.459.062,82	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	-1,04
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.238.459.062,82	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.493.814.350,00	12.282.718.546,30	-	40.731.598.758,00	7.169.148.041,76	-62,63

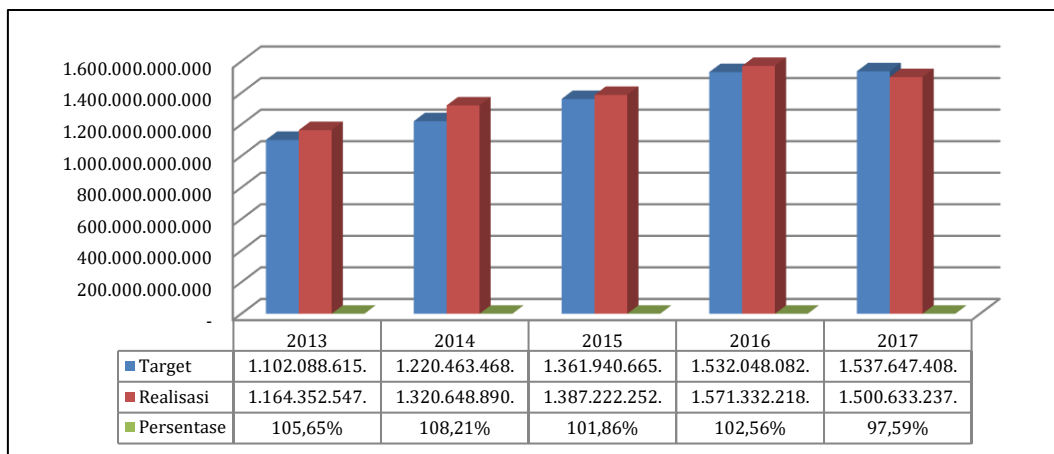
No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata- rata Pertum- buhan (%)
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	39.039.796.578,00	6.988.000.000,00	-66,05
2.2	Pembayaran Pokok Utang	1.493.814.350,00	2.282.718.546,30	-	1.691.802.180,00	181.148.041,76	-18,24

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, secara umum pendapatan daerah Kota Jambi selalu mengalami peningkatan. Hal ini didukung meningkatnya Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk pertumbuhan pendapatan daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 6,81%, yang didukung dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,89%, Dana Perimbangan sebesar 6,91% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -10,23%. Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut:



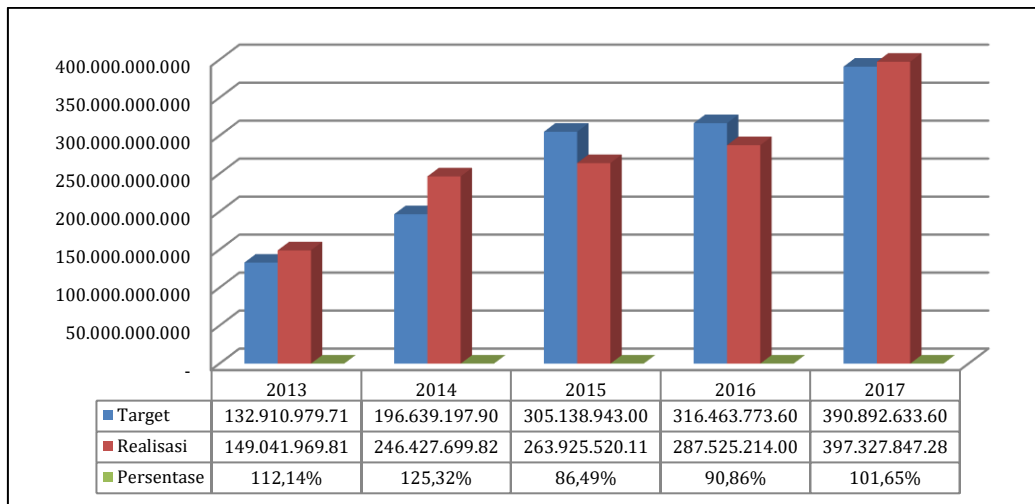
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari target 132,910 milyar rupiah realisasinya 149,041 milyar rupiah (112,14%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dari target sebesar 390,892 milyar rupiah terrealisasi sebesar 397,327 milyar rupiah (101,65%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik dibawah.

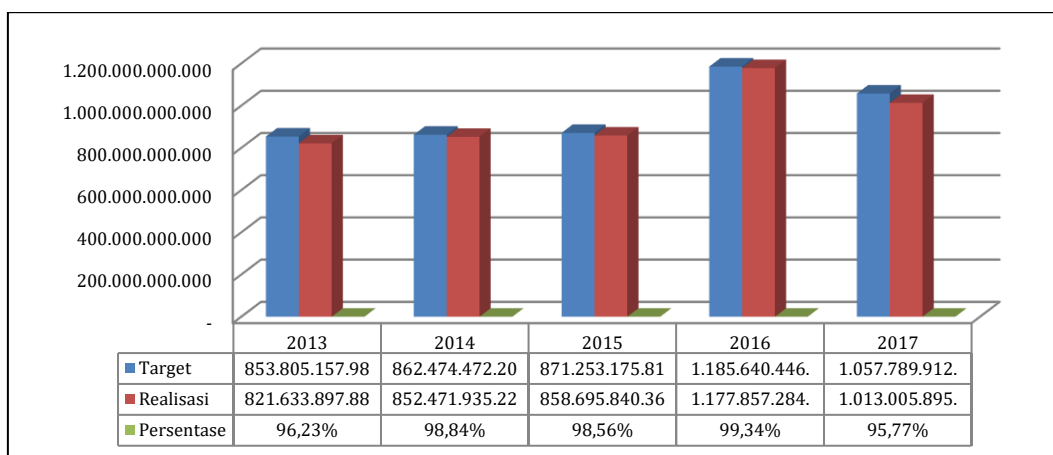


Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

2. Dana Perimbangan

Selama tahun 2013-2017, realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan secara fluktuatif, hal ini terlihat dari target dana perimbangan tahun 2013 sebesar 853,805 milyar rupiah realisasinya 821,633 milyar rupiah (96,23%); dan tahun 2017 dari target sebesar 1,057 triliun rupiah hanya terrealisasi sebesar 1,013 triliun rupiah (95,77%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



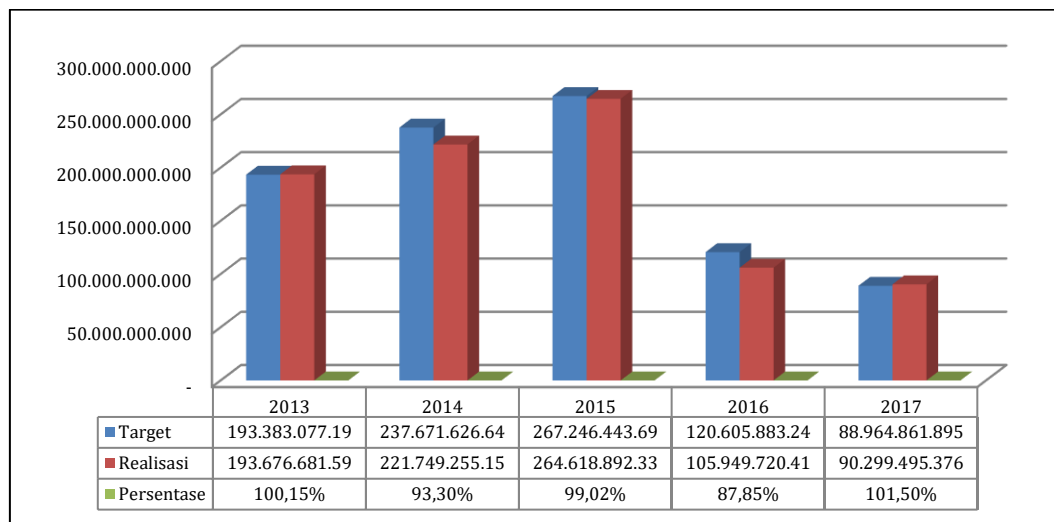
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.3.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013-2017

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2013, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan 193,383 milyar rupiah terealisasi sebesar 203,334 milyar rupiah (105,15%), terus meningkat hingga tahun 2015 yang ditargetkan 267,246 milyar rupiah realisasinya sebesar 264,618

milyar rupiah (99,02%), dan ditahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan target 120,605 milyar rupiah realisasinya hanya 105,949 milyar rupiah (87,85%), dan ditahun 2017 terjadi penurunan kembali dari target sebesar 88,964 milyar rupiah terealisasi sebesar 90,299 milyar rupiah (101,50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.4.

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

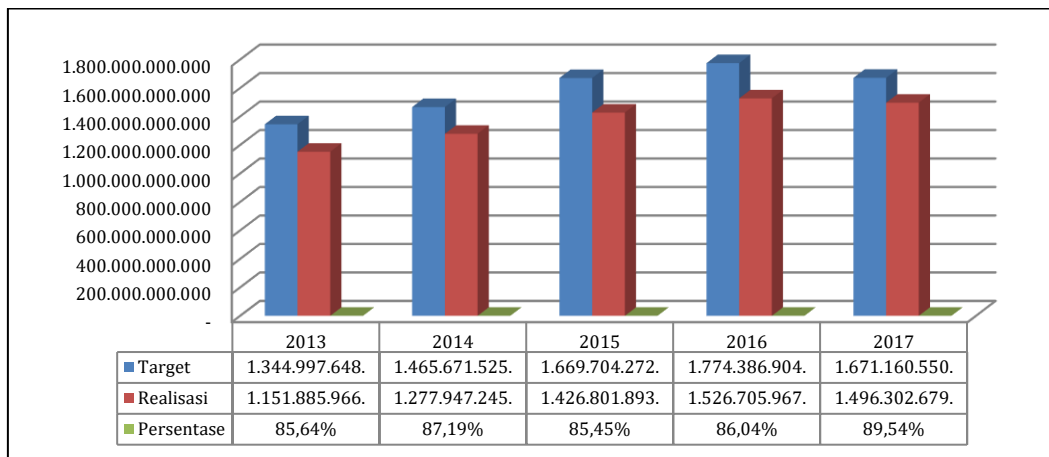
3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2013-2017, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Jambi sebesar 6,879 triliun rupiah dari rencana sebesar 7,925 triliun rupiah (86,80%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



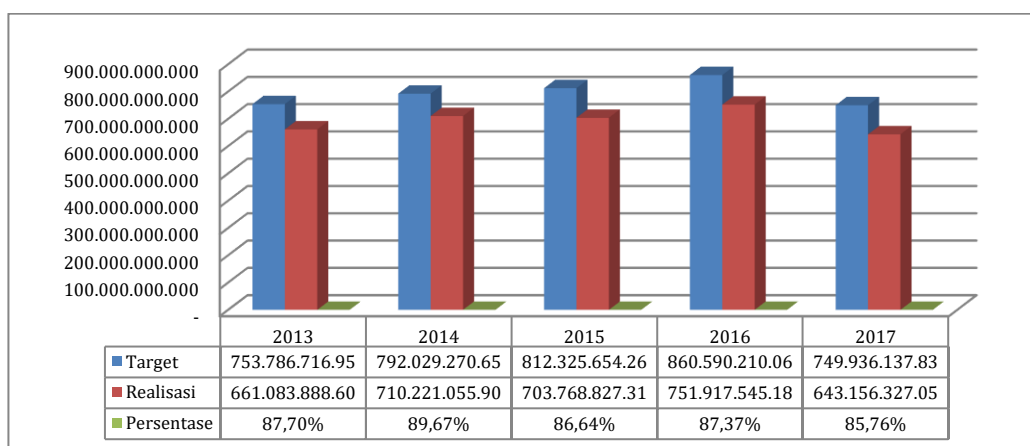
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.5.

Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013-2017

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2013-2017 sebesar 3,470 triliun rupiah dari rencana sebesar 3,968 triliun rupiah atau sebesar 87,44%. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik berikut.



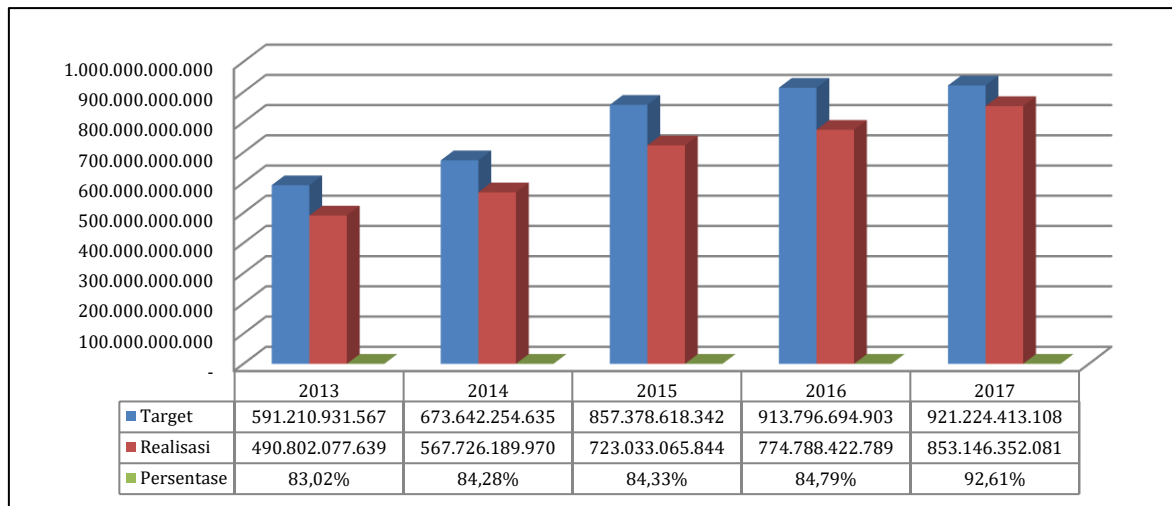
Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.6.

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2017

2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2013-2017 sebesar 3,409 triliun rupiah dari target sebesar 3,957 triliun rupiah atau sebesar 86,16%. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Gambar 3.7.

Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013-2017

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Jambi mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya

memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- Penyertaan modal kepada BUMD;
- Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Jambi tahun 2013-2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PENERIMAAN	148.238.459.062	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
SiLPA TA Sebelumnya	148.238.459.062	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
PENGELUARAN	21.493.814.350	12.282.718.546	0	40.731.598.758	7.169.148.042
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	0	39.039.796.578	39.039.796.578
Pembayaran Pokok Utang	1.493.814.350	2.282.718.546,30	0	1.691.802.180	1.691.802.180
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	126.744.644.713	124.645.790.699	169.630.153.537	89.348.040.166	127.320.238.476

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber satu-satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SiLPA yang besarnya fluktuatif. Hal ini menunjukkan peningkatan SiLPA yang tidak diharapkan tidak dapat terwujud. Di masa mendatang Pemerintah Kota

Jambi harus lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD disusul sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang. Dengan banyaknya penerimaan pembiayaan, seharusnya Pemerintah Kota Jambi lebih berani lagi dalam penggunaan penerimaan pembiayaan, misalnya dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

3.1.2. Neraca Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Jambi menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan asset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban baik jangka panjang maupun pendek, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul dari konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi dimasa yang akan datang. Ekuitas dana yang meliputi Dana lancar dan investasi merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah.

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Jambi tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1930,37%	2764,38%	2135,24%	895,09%	700,45%
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1844,43%	2563,41%	1970,36%	815,44%	618,17%

3.	Rasio total hutang terhadap aset	0,39%	0,30%	0,27%	1,94%	2,03%
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,39%	0,27%	0,28%	1,97%	2,07%

Perkembangan jumlah aset Kota Jambi menunjukkan fluktuatif dimana mulai tahun 2013 sebesar Rp. 2.834.180.148.702 meningkat menjadi Rp. 3.389.620.552.563 pada tahun 2015, kemudian terjadi penurunan aset pada tahun 2017 menjadi 2.791.326.204.027, hal ini dikarenakan adanya akumulasi penyusutan dan Amortisasi terhadap aset-aset yang ada pada tahun 2017. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp. 10.943.610.924 pada tahun 2013 menjadi Rp. 56.529.212.124 pada tahun 2017. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A.	ASET					
1	Aset Lancar					
	Kas di Kas Daerah	139.077.589.994,64	168.885.502.258,12	129.645.704.136,74	133.844.212.656,76	105.775.310.526,87
	Kas di BLUD	-	-	-	-	21.187.010.666,03
	Kas Lainnya Dana BOS	-	-	-	4.309.323.057,40	4.670.389.966,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	207.906.616,00	825.903.539,00	484.533.302,00	194.016.988,00	38.354.212,00
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	94.444.710,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	9.832.000,00	8.758.000,00	46.449.500,00	19.982.696,00	6.760.360,00
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	50.000.000,00
	Piutang Pajak	41.509.242.791,00	31.580.850.088,00	51.386.861.532,00	59.490.145.409,00	62.730.513.866,00
	Piutang Retribusi	2.461.752.546,00	2.917.293.441,25	3.362.192.048,75	3.076.107.509,75	3.142.088.174,25
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	200.000,00	88.665.000,00
	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	11.242.884.093,00	15.588.190.887,00	-	-	-
	Piutang Lainnya	7.338.340.411,00	2.386.495.049,00	-	8.080.264.138,00	7.385.795.149,00
	Penyisihan Piutang	-	-	(1.938.967.591,00)	(29.569.021.313,90)	(39.315.190.713,79)
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	524.870.564,00	623.270.228,00	245.160.515,25
	Persediaan	9.404.137.096,76	17.419.628.043,64	15.356.584.320,59	17.588.136.637,64	22.108.756.764,27
	Jumlah Aset Lancar	211.251.685.548,40	239.612.621.306,01	198.868.227.813,08	197.656.638.006,65	188.208.059.195,88
2	Investasi Jangka Panjang					
	Investasi Nonpermanen	255.357.240,10	261.478.036,32	199.296.036,32	19.547.363,98	19.673.400,59
	Investasi Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)	56.376.589.446,00	66.906.880.646,00	65.051.395.965,82	127.829.676.379,99	134.729.300.093,38
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	56.631.946.686,10	67.168.358.682,32	65.250.692.002,14	127.849.223.743,97	134.748.973.493,97

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3	Aset Tetap					
	Tanah	456.825.675.083,00	472.934.455.252,00	475.243.924.252,00	481.346.826.952,00	429.849.671.502,00
	Peralatan dan Mesin	375.602.944.207,00	434.017.560.944,77	479.323.832.515,50	503.473.427.161,57	550.633.614.181,87
	Gedung dan Bangunan	665.332.063.541,40	739.511.420.434,45	774.897.313.909,51	871.183.176.438,12	879.346.393.657,18
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.013.806.748.794,65	1.145.715.391.115,86	1.394.517.596.521,97	1.639.074.967.370,01	1.824.961.081.518,32
	Aset Tetap Lainnya	46.247.683.642,93	53.876.087.373,54	79.242.935.341,15	124.804.427.216,24	196.676.491.102,67
	Konstruksi dalam Pengerjaan	670.541.825,00	-	2.069.825.002,10	31.194.115.704,83	15.000.698.158,49
	Akumulasi Penyusutan	-	-	(96.347.814.283,96)	(1.394.513.185.665,30)	(1.549.786.214.990,86)
	Jumlah Aset Tetap	2.558.485.657.093,98	2.846.054.915.120,62	3.108.947.613.258,27	2.256.563.755.177,47	2.346.681.735.129,67
4	Aset Lainnya					
	Tuntutan Ganti Rugi	767.787.040,00	767.787.040,00	767.787.040,00	785.110.815,00	827.738.815,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00
	Aset Tak Berwujud	1.603.166.000,00	1.399.248.518,92	1.877.217.318,92	2.325.381.318,92	2.980.727.318,92
	Aset Lain-Lain	5.439.906.334,00	5.785.267.743,00	13.909.015.130,65	45.706.384.430,92	79.268.953.152,42
	Amortisasi	-	-	-	-	(2.506.983.078,00)
	Jumlah Aset Lainnya	7.810.859.374,00	7.952.303.301,92	16.554.019.489,57	89.933.876.564,84	121.687.436.208,34
	JUMLAH ASET	2.834.180.148.702,48	3.160.788.198.410,87	3.389.620.552.563,06	2.672.003.493.492,93	2.791.326.204.027,86
B.	KEWAJIBAN					
1	Kewajiban Jangka Pendek					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	74.268.850,00	81.252.260,00	79.724.240,00	33.921.525,00	27.028.443,00
	Utang Bunga	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05	8.586.623.528,05
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	6.191.573.257,00	6.277.714.534,75
	Utang Belanja	-	-	647.280.053,00	4.893.544.641,00	7.161.252.249,54
	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.282.718.546,30	-	-	2.376.670.990,00	4.816.923.369,06
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.943.610.924,35	8.667.875.788,05	9.313.627.821,05	22.082.333.941,05	26.869.542.124,40

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
2	Kewajiban Jangka Panjang					
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	29.659.670.000,00	29.659.670.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	29.659.670.000,00	29.659.670.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN		10.943.610.924,35	8.667.875.788,05	9.313.627.821,05	51.742.003.941,05	56.529.212.124,40
C.	EKUITAS					
JUMLAH EKUITAS		2.823.236.537.778,13	3.152.120.322.622,82	3.380.306.924.742,01	2.620.261.489.551,88	2.734.796.991.903,46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.834.180.148.702,48	3.160.788.198.410,87	3.389.620.552.563,06	2.672.003.493.492,93	2.791.326.204.027,86

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 2) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
- 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- 8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Jambi.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanjalangsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (pihak swasta) bila memungkinkan.

5. *Transparan dan Akuntabel*

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

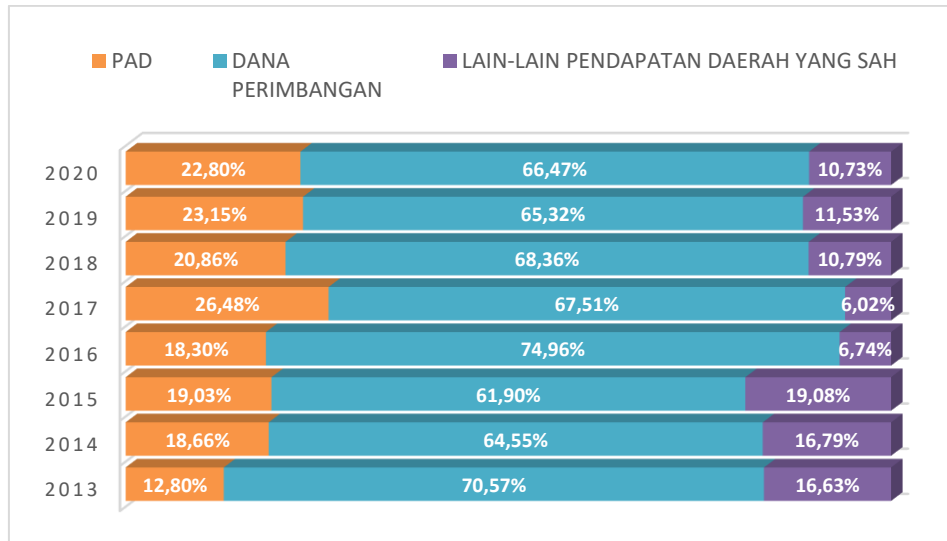
3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 coverage.

3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

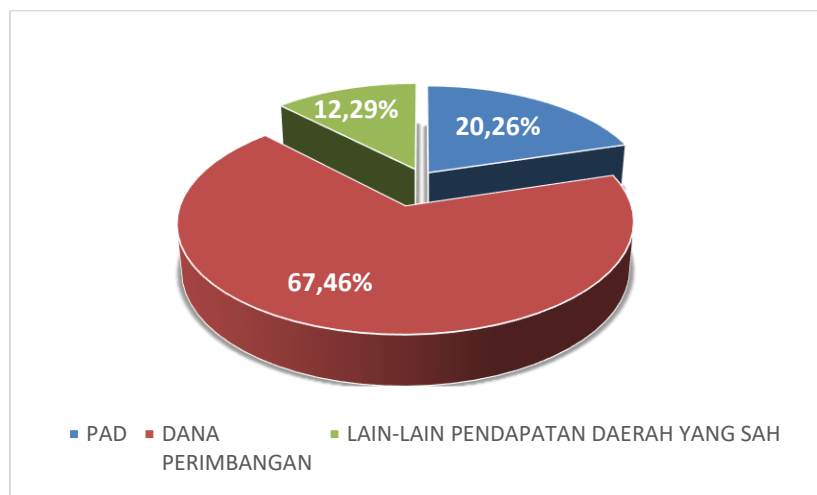
Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013-2017 Pemerintah Kota Jambi berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Jambi.

Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Jambi dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.8.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

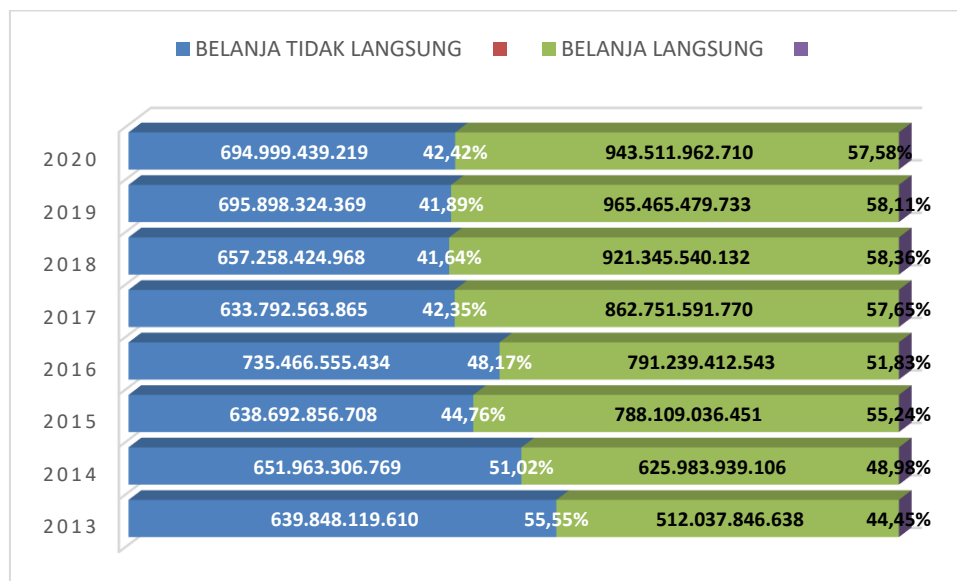
Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2013-2017, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 19,36%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12,62%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Jambi yakni 68,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9.



Gambar 3.9.
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2020

3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, masing-masing komponen belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan. Walaupun proporsi belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10.



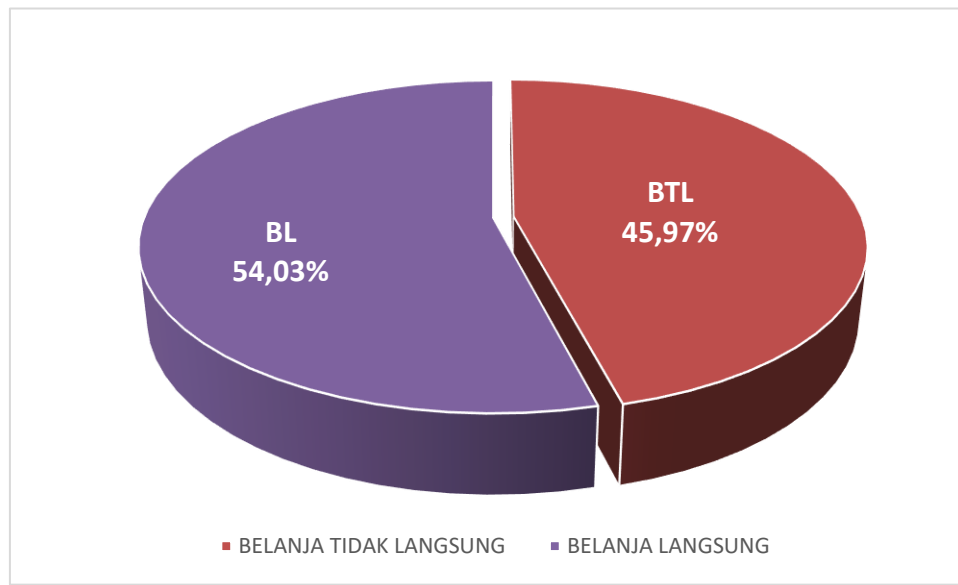
Gambar 3.10.
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2013-2020

Selanjutnya jika dilihat proporsi belanja aparatur/pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Jambi
Tahun 2013-2020

No	Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1	2013	592,744,670,347	1,151,885,966,248	51.46%
2	2014	642,424,088,743	1,277,947,245,875	50.27%
3	2015	627,677,871,221	1,426,801,893,159	43.99%
4	2016	721,853,145,335	1,526,705,967,977	47.28%
5	2017	609,075,861,181	1,496,544,155,635	40.70%
6	2018	614,857,160,444	1,578,603,965,100	38.95%
7	2019	674,533,158,047	1,661,363,804,102	40.60%
8	2020	628,395,170,421	1,638,511,401,928	38.35%

Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2013-2017, proporsi belanja langsung hanya 52,04%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja tidak langsung sebesar 47,96%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada telah lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara skematik proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11.



Gambar 3.11.
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2013-2020

3.2.6. Analisis Pembiayaan Daerah

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.164.352.549.296,01	1.320.648.890.197,28	1.387.222.252.820,42	1.571.332.218.626,47	1.500.633.237.946,70
	Dikurangi Realisasi :					
2.	Belanja Daerah	1.151.885.966.248,19	1.277.947.245.874,50	1.426.801.893.158,80	1.526.705.967.976,45	1.496.544.155.634,80
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.493.814.350,00	12.282.718.546,30		40.731.598.758,00	7.169.148.041,76
	Defisit Riil	-9.027.231.302,18	30.418.925.776,48	-39.579.640.338,38	3.894.651.892,02	-3.080.065.729,86

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	139.211.227.760,64	169.630.153.537,12	130.050.513.198,74	133.974.290.815,76	131.650.797.287,90
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	95.530.000,00	490.279.094,00	547.233.821,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	10.079.390.375,75	0.00	9.883.239.140,50	12.158.403.461,50

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2018

Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	139.211.227.760,64		169.630.153.537,12		130.050.513.198,74		133.974.290.815,76		131.650.797.287,90	
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	16.130.990.108,21	12,25	49.788.501.926,28	37,82	(41.213.422.880,58)	-31,31	(28.938.559.595,51)	-21,98	6.435.213.689,10	4,89
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(25.443.048.474,00)	-19,33	(17.696.755.828,00)	-13,44	(7.202.866.805,58)	-5,47	(18.054.225.131,02)	-13,71	(50.988.383.911,40)	-38,73
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	253.337.000,80	0,19	521.847.475,00	0,40	0,00	0,00	(4.385.100.422,00)	-3,33	819.000.000,00	0,62
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	148.269.949.125,63	112,62	137.016.559.963,84	104,08	178.466.822.884,32	135,56	185.352.175.964,29	140,79	175.384.967.510,20	133,22
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ke Tiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.9.
Defisit Rill Anggaran Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Surplus (Defisit)	22.124.827.323	51.451.644.324	(39.561.640.339)	44.626.250.650	4.330.558.812
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	148.238.459.063	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	148.238.459.063	139.211.227.761	169.630.153.537	130.079.638.924	134.489.386.518
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.493.814.350	12.282.718.546	0	40.731.598.758	7.169.148.042
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	0	39.039.796.578	6.988.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.493.814.350	2.282.718.546	-	1.691.802.180	181.148.042
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu	-	-	-	-	-
3.2.6	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	126.744.644.713	139.211.227.761	169.630.153.537	89.348.040.166	127.320.238.476
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	148.869.472.036	190.662.872.085	130.068.513.198	133.974.290.816	131.650.797.288

Keterangan : SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Jambi pada tahun 2013-2017 berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, secara berurutan nilainya sebesar 139,2 milyar, 169.6 milyar, 130,05 milyar, 133,9 milyar dan 131,6 milyar. Selain itu, juga berasal dari pos Penerimaan Piutang Daerah pada tahun 2014 sebesar 10,07 milyar, tahun 2016 sebesar 9,8 milyar dan tahun 2017 sebesar 12,15 milyar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jambi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya.

Pada tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Jambi tahun 2013-2017 terbesar berasal dari pos Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, dimana nilainya berkisar antara 137 milyar hingga 185 milyar. Sedangkan dari pos pelampauan penerimaan PAD nilainya positif pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami pelampauan dari target PAD, hal ini dikarenakan penetapan target PAD yang jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun secara realisasi, persentase penerimaan PAD dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 3.8 diatas pada tahun 2013 dan tahun 2014, APBD Kota Jambi mengalami surplus 22,124 milyar dan 51,451 milyar akan tetapi di tahun 2016 mengalami defisit sebesar 39,561 milyar hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi belanja daerah. Namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami surplus kembali sebesar 44,626 Milyar dan 4,330 Milyar.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan tahun 2018-2023. Sedangkan pendapatan tahun 2018 menggunakan data APBD Perubahan Kota Jambi Tahun 2018. Pendapatan daerah Kota Jambi diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,628,500,835,180.00 pada tahun 2018 dan menjadi sebesar Rp. 1.995.369.239.000,- pada tahun 2023. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2013-2017 berada pada angka rata-rata 5,11%
2. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2013-2017 pada angka 6,66%.
3. Pendapatan pajak naik rata-rata sebesar 10,02%.
4. Pendapatan retribusi daerah naik sebesar 3,17%.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,07%.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 13,48%.
7. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) 3,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK)- 2,90% dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,75%.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date*.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD yang ada dan mengali potensi pendapatan baru melalui pembentukan BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
7. Pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam hal proyeksi belanja daerah didasarkan pada realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017. Proyeksi Belanja pada Tahun 2018-2022 masih mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, sedangkan untuk Tahun 2023 dan masa transisi Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;

4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Asumsi pembiayaan yaitu SiLPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, diharapkan mencapai angka nol. Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja.

Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada maupun rencana pembentukan BUMD yang baru untuk memperkuat struktur modal dan juga memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Provinsi. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Tabel 3.10.
Proyeksi RPJMD dan
APBD Kota Jambi Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD
1.00	PENDAPATAN	1,628,500,835,180	1,627,977,843,445	1,660,053,885,000	1,660,053,885,000	1,745,418,018,000	1,745,507,222,930
1.01	Pendapatan Asli Daerah	335,902,135,250	328,896,647,550	364,142,193,000	364,142,193,000	418,375,472,000	403,484,193,000
1.01.01	Pajak Daerah	203,500,000,000	200,000,000,000	223,000,000,000	223,000,000,000	260,000,000,000	255,000,000,000
1.01.02	Retribusi Daerah	44,012,000,000	42,846,000,000	46,726,000,000	46,726,000,000	50,366,850,000	47,568,000,000
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8,850,000,000	8,500,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,780,000,000	10,000,000,000
1.01.04	Lain-lain PAD yang sah	79,540,135,250	77,550,647,550	85,416,193,000	85,416,193,000	98,228,622,000	90,916,193,000
1.02	Dana Perimbangan	1,125,497,214,930	1,125,550,934,000	1,134,707,598,000	1,134,707,598,000	1,144,291,970,000	1,126,863,703,930
1.02.01	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	118,890,269,930	118,943,989,000	137,956,917,000	137,956,917,000	139,000,000,000	102,028,814,930
1.02.02	Dana Alokasi Umum	714,783,378,000	714,783,378,000	757,404,051,000	757,404,051,000	764,748,606,000	763,018,217,000
1.02.03	Dana Alokasi Khusus	291,823,567,000	291,823,567,000	239,346,630,000	239,346,630,000	240,543,364,000	261,816,672,000
1.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	167,101,485,000	173,530,261,895	161,204,094,000	161,204,094,000	182,750,576,000	215,159,326,000
1.03.01	Hibah	62,534,000,000	61,845,400,000	61,845,400,000	61,845,400,000	61,845,400,000	58,911,800,000
1.03.03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **)	81,347,485,000	86,964,861,895	81,347,485,000	81,347,485,000	100,893,967,000	131,000,000,000
1.03.04	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	18,000,000,000	18,000,000,000	11,291,209,000	11,291,209,000	13,291,209,000	18,527,526,000
1.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5,220,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000	6,720,000,000

No.	Uraian	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD	PROYEKSI RPJMD	APBD
2.00	BELANJA	1,755,151,632,467	1,671,628,127,491	1,710,612,142,885	1,710,612,142,885	2,177,900,775,000	2,212,680,342,930
2.01	Belanja Tidak Langsung	759,889,727,857	749,279,018,491	795,111,216,885	795,111,216,885	796,723,410,000	753,881,710,930
2.01.01	Belanja Pegawai	709,626,059,182	699,171,149,816	769,336,362,485	769,336,362,485	770,842,287,000	721,563,236,930
2.01.02	Belanja Bunga	0		0		3,600,000,000	1,000,000,000
2.01.04	Belanja Hibah	42,749,214,275	42,593,414,275	14,725,400,000	14,725,400,000	14,725,400,000	21,553,843,619
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	4,116,455,000	4,116,455,000	7,651,455,000	7,651,455,000	4,157,723,000	7,637,723,000
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	1,292,132,400	1,292,132,400	1,292,132,400	1,292,132,400	1,292,133,000	100,000,000
2.01.08	Belanja tidak terduga	2,105,867,000	2,105,867,000	2,105,867,000	2,105,867,000	2,105,867,000	2,026,907,381
2.02	Belanja Langsung	995,261,904,610	922,349,109,000	915,500,926,000	915,500,926,000	1,381,177,365,000	1,458,798,632,000
2.02.01	Belanja Pegawai	70,245,532,548	80,090,602,958	64,233,008,032	64,233,008,032	65,517,669,000	64,787,962,108
2.02.02	Belanja barang dan jasa	460,107,061,790	410,408,318,737	472,736,494,365	472,736,494,365	496,330,323,000	567,399,452,976
2.02.03	Belanja Modal	464,909,310,272	431,850,187,305	378,531,423,603	378,531,423,603	819,329,373,000	826,611,216,916
	SURPLUS/(DEFISIT)	(126,650,797,287)	(43,650,284,046)	(50,558,257,885)	(50,558,257,885)	(432,482,757,000)	(467,173,120,000)
3.00	PEMBIAYAAN	126,650,797,287	43,650,284,046	50,558,257,885	50,558,257,885	432,482,757,000	467,173,120,000
3.01	Penerimaan Pembiayaan	131,650,797,287	48,650,284,046	50,558,257,885	50,558,257,885	447,482,757,000	467,173,120,000
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	131,650,797,287	48,650,284,046	50,558,257,885	50,558,257,885	47,482,757,000	67,173,120,000
3.01.03	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	400,000,000,000	400,000,000,000
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0
3.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	15,000,000,000	0

Tabel 3.11.
APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	APBD 2021	APBD 2022	PROYEKSI RAPBD 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1,655,334,439,926	1,690,837,982,885	1.419.660.132.075
1.1	Pendapatan Asli Daerah	419,564,834,233	465,887,262,838	506.699.848.172
1.1.01	Pajak Daerah	270,860,000,000	317,880,000,000	350.000.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	47,875,900,000	49,761,000,000	52.588.197.203
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	9,602,267,383	10.000.000.000
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	91,226,666,850	88,643,995,455	94.111.650.969
1.2	Pendapatan Transfer	1,175,857,805,693	1.162.863.727.047	912.960.283.903
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,060,921,226,000	1,162,863,727,047	782.995.596.000
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1,020,401,698,000	1,049,712,354,000	782.995.596.000
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	89,173,247,000	1,039,327,944,000	107.706.883.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	697,632,020,000	107,706,883,000	675.288.713.000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106,961,013,000	675,288,713,000	0
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126,635,418,000	57,738,124,000	0
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	40,519,528,000	10,384,410,000	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114,936,579,693	113,151,373,047	129.964.687.902,91
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	111,216,579,693	113,151,373,047	129.964.687.902,91
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	3,720,000,000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	59,911,800,000	62.086.993.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	59,911,800,000	62,086,993,000	0
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	1,000,000,000	0	0
1.3.1.02	Pendapatan Hibah Dana Bos	58,911,800,000	62,086,993,000	0
2	BELANJA DAERAH	2,073,287,529,465	1,773,747,078,885	1.409.660.132.075
2.1	Belanja Operasi	1,321,000,163,809	1,385,937,983,167	
2.1.01	Belanja Pegawai	720,771,684,715	716,132,993,086	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530,384,808,867	540,444,547,923	
2.1.03	Belanja Bunga	15,000,000,000	8,000,000,000	
2.1.04	Belanja Hibah	46,846,715,377	1,259,178,000	
2.1.05	Belanja Bantuan Sosial	7,996,954,850	113,162,997,058	
2.1.06	Belanja Subsidi		6,938,267,100	
2.2	Belanja Modal	742,652,799,631	368,859,813,748	
2.2.01	Belanja Modal Tanah	9,450,000,000	9,000,000,000	
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78,264,734,577	54,400,356,213	
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389,646,776,694	164,440,567,946	
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	253,690,354,718	129,630,403,339	
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,600,933,642	11,388,486,250	

No.	Uraian	APBD 2021	APBD 2022	PROYEKSI RAPBD 2023
2.3	Belanja Tidak Terduga	9,634,566,025	18,949,281,970	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(417,953,089,539)	(82.909.096.000)	10.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	417,953,089,539	82.909.096.000	(10.000.000.000,00)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	419,953,089,539	130.409.096.000	75.000.000.000,00
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34,953,089,539	75.000.000.000	75.000.000.000,00
3.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	385,000,000,000	55.409.096.000	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	47.500.000.000	85,000,000,000.00
3.2.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ke Bank Jambi	2,000,000,000	0	10,000,000,000,00
3.2.02	Penyertaan Modal Pemkot ke Peseroda Siginjai Sakti	0	500.000.000	5,000,000,000,00
3.2.03	Pembayaran Pokok Utang atas pinjaman	0	47.000.000.000	70,000,000,000,00

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Selanjutnya, penggunaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu Prioritas I untuk Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Prioritas II untuk Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas di luar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Hasil penghitungan Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2018-2023 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2018-2023 tercantum pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.

Tabel 3.12.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4	Tahun n+5
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.660.053.885.000	1.728.854.168.000	1.810.498.430.000	1.896.175.855.000	1.995.369.239.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)					
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.558.257.885	40.446.607.000	32.357.286.000	25.885.829.000	20.708.664.000
	Total Penerimaan	1.710.612.142.885	1.769.300.775.000	1.842.855.716.000	1.922.061.684.000	2.016.077.903.000
	<i>Dikurangi:</i>					
4	Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
5	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000

Tabel 3.13.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 - 2023

NO.	URAIAN	Proyeksi				
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
	Prioritas I					
	Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala Daerah	582.000.000.000	620.000.000.000	645.000.000.000	681.000.000.000	690.000.000.000
	Prioritas II					
	Belanja Langsung untuk Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I	333.500.926.000	355.177.365.000	393.126.249.000	419.048.498.000	452.059.194.000

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efesiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Jambi.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD yang telah ada dan mengalokasikan anggaran pada pembentukan BUMD baru serta Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan mengalokasikan anggaran pada pembentukan BUMD baru dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jambi, serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :
 - 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

- 1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah
- 3. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah
- 4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;

5. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jambi.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2. Pembentukan dana cadangan secara bertahap dalam mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
3. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah.
4. Dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi 2018-2023 Pembangunan Infrastruktur melalui skema Pinjaman Daerah guna peningkatan perekonomian daerah, membentuk Sumber Daya Manusia yang kompetitif serta penataan kawasan untuk lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jambi berencana untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang digunakan untuk kegiatan: 1) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti; 2) Pendestrian Trotoar dalam Kota Jambi; 3) Peremajaan Pipa PDAM; 4) Terminal Rawasari; 5) Kawasan Ecowisata Danau Sipin; 6) Gedung Parkir (eks Istana Anak-anak); 7) Penataan Pendestrian dan Box Utilitas Kawasan Pasar; 8) Gedung Serbaguna; dan 9) Sport Center Kota Jambi.